



2022
LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB.BONE

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018 -2023, LKjIP Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN Tahun 2018 - 2023).

Dalam mencapai tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel secara berkesinambungan.

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 yang digunakan sebagai Landasan penyusunan Rencana kerja dan perjanjian Kinerja.

Rencana kerja dan perjanjian Kinerja Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Badan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 .

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan keuangan dan Aset daerah tahun 2022 ini, dapat menjadi saran Evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Watampone, 17 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BONE



H. NAJAMUDDIN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip .19631007 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. UMUM.....	2
B. ORGANISASI	8
1. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD	5
2. Struktur Organisasi.....	6
C. ISU STRATEGIS	11
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. TUJUAN DAN SASARAN	15
1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	15
2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	15
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	16
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	18
D. PERJANJIAN KINERJA.....	20
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA BKAD.....	25
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	26
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022	27
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	29
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	30
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	35
7. Upaya Perbaikan Berikutnya	41
8. Layanan Administrasi Perkantoran.....	44
B. REALISASI ANGGARAN.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan Umum.....	48
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi.....	48
LAMPIRAN	52

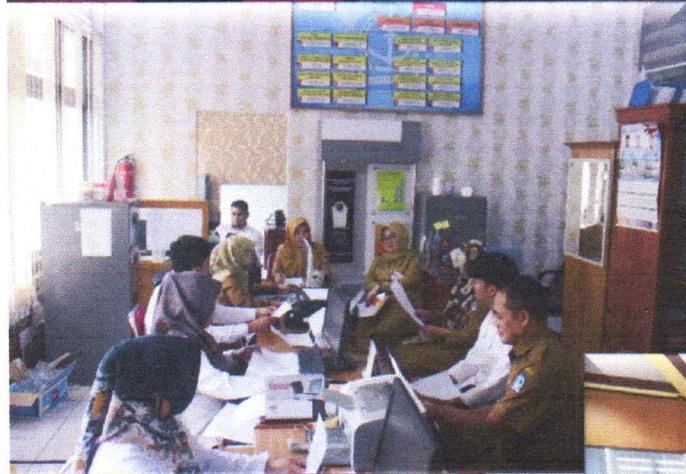


BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I PENDAHULUAN



- A. UMUM
- B. ORGANISASI
- C. ISU STRATEGIS
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilannya atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia Birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6757); dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana telah tertuang pada Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BKAD untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggung jawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

LKjIP ini merupakan bentuk formal pertanggung jawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang bermanfaat untuk :

- a. Mewujudkan rumusan kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan realistis.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral.
- c. Menyerahkan kegiatan pengelolaan keuangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keseimbangan keuangan antar wilayah dan sektor sesuai dengan unit kerjanya.
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya.

B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Bahwa dalam rangka implementasi

penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, Maka Perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perkembangan Peraturan Perundang – Undangan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi BKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati No 94 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Badan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

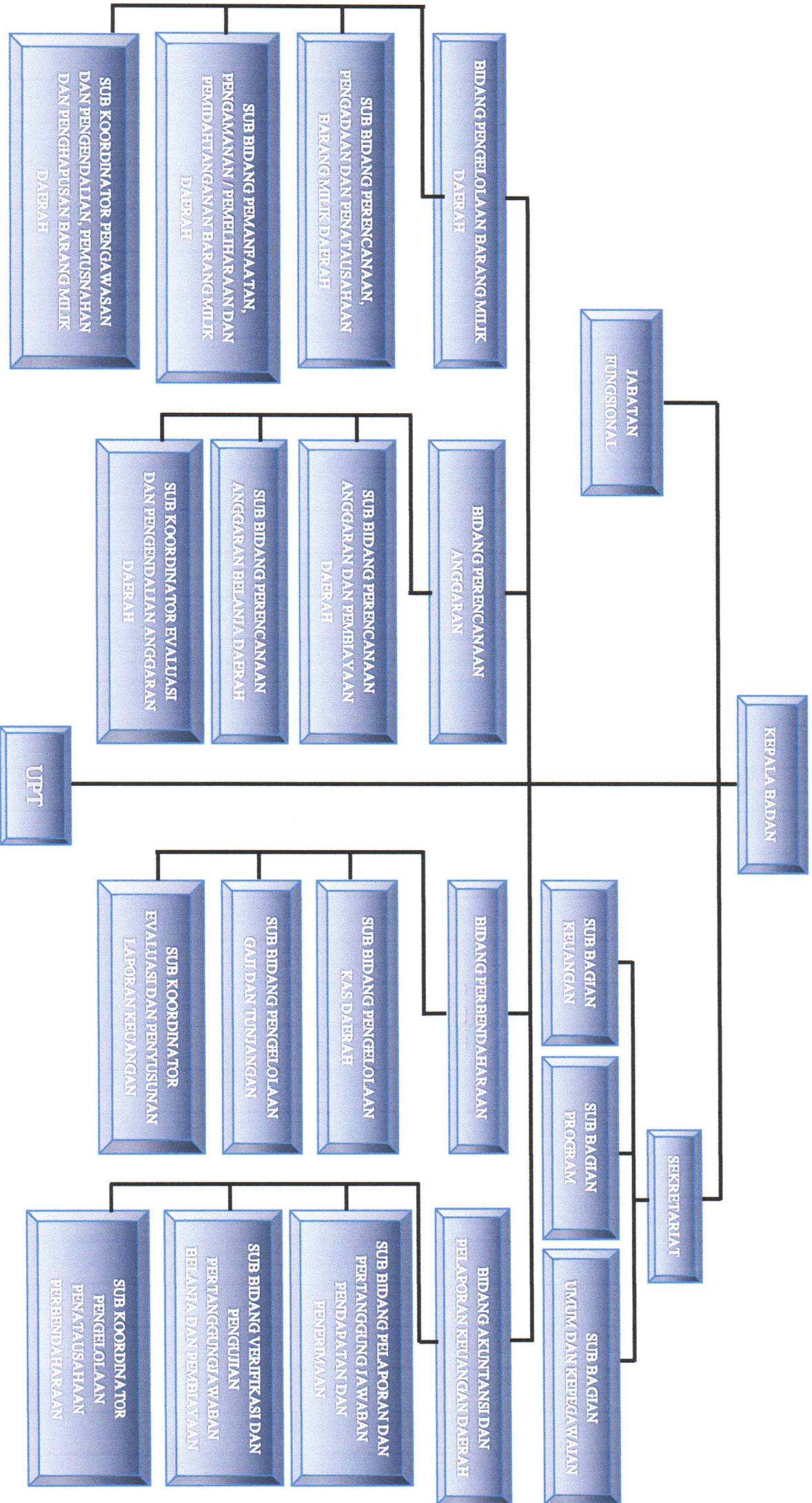
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Komposisi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi personil yang mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah 107 pegawai terdiri dari 49 PNS dan 58 Non PNS. Dilihat dari jenis kelamin pegawai PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah, pegawai laki-laki 20 Orang dan 29 Orang perempuan. Dan Non PNS Laki laki 33 Orang dan Perempuan 25 Orang, Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut

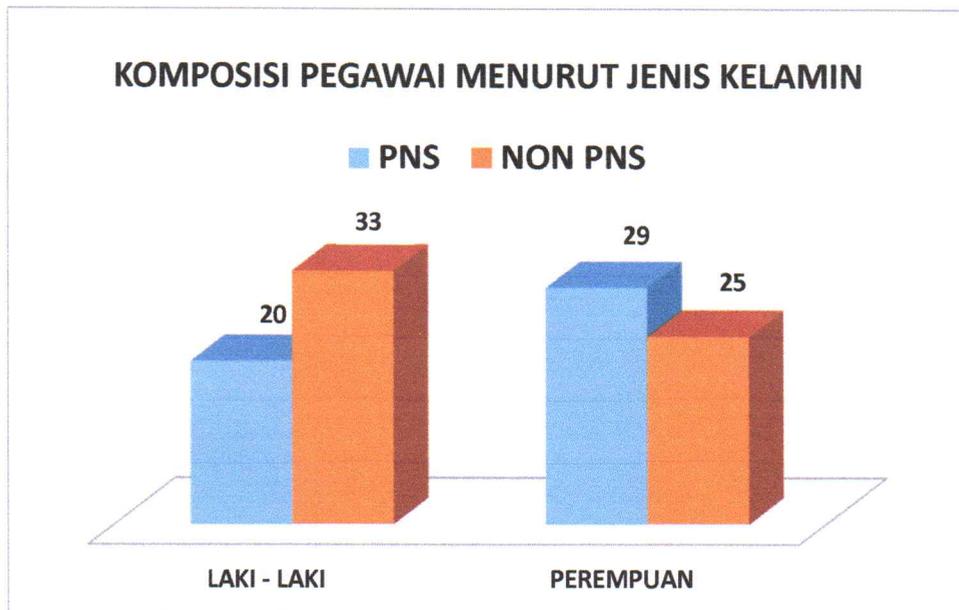


Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah



Sumber Data Sekretariat BKAD Tahun 2022

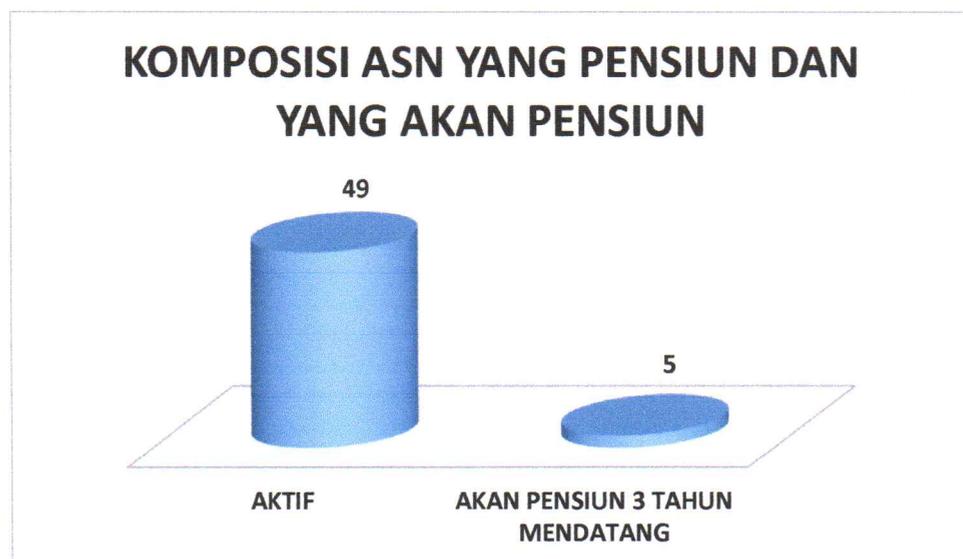
Grafik 1.1



Sumber : Sekretariat BKAD 2022

Jika Dilihat berdasarkan Status Aktif Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah, dari 49 Pegawai yang terdaftar, Tahun 2022 tidak ada yang Pensiun, dan Dalam 3 Tahun Mendatang ada 5 Pegawai yang juga akan Pensiun, yang selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

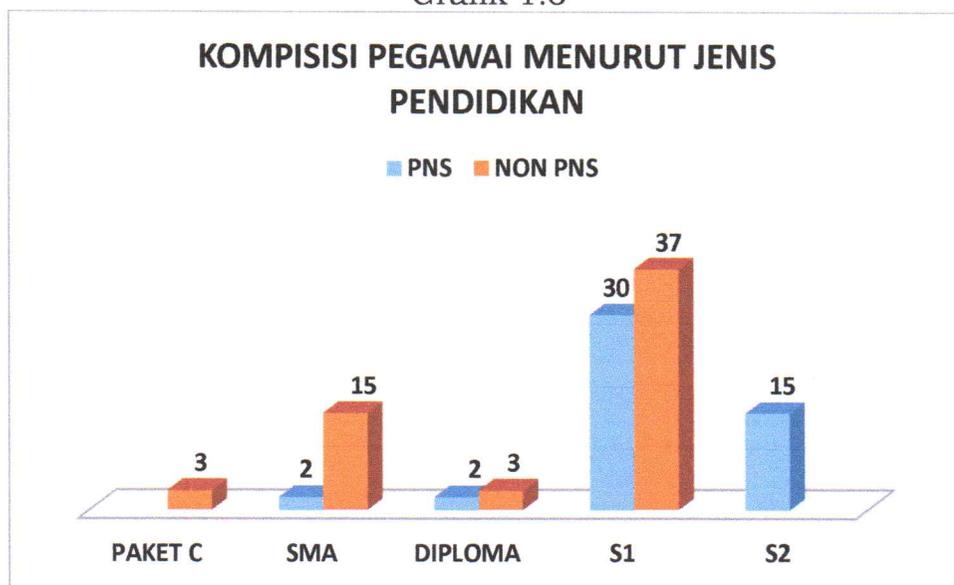
Grafik 1.2



Sumber : Sekretariat BKAD 2022

Jika dilihat berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sarjana S-1 yaitu sebanyak 67 Orang, Kemudian SMA Sebanyak 17 Orang, S-2 sebanyak 15 Orang, Diploma Sebanyak 5 Orang, dan Paket C Sebanyak 3 Orang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

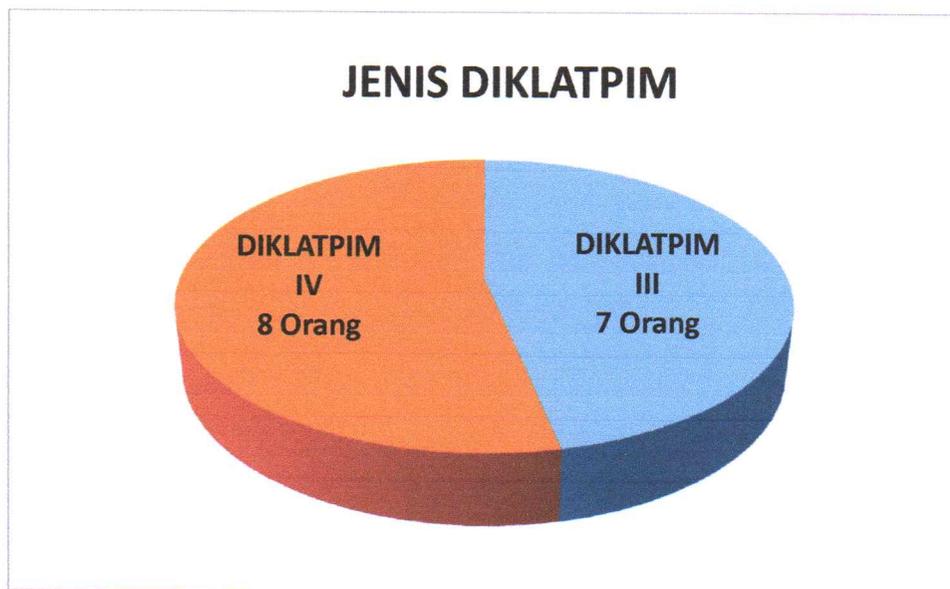
Grafik 1.3



Sumber Data: Sekretariat BKAD 2022

Secara berkala pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti diklat struktural. Hingga tahun 2022, jumlah yang mengikuti diklatpim sebanyak 16 pegawai, yaitu diklatpim III dan IV sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

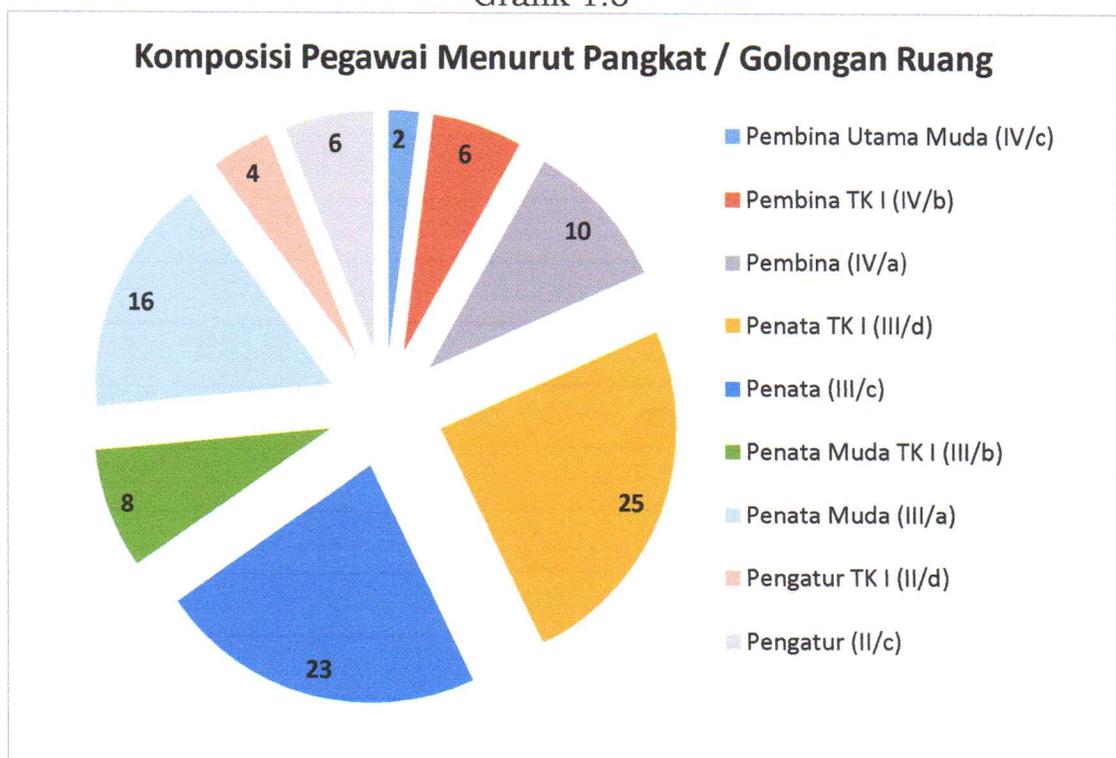
Grafik 1.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural



Sumber Data: Sekretariat BKAD 2022

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang terbanyak adalah golongan III/d yaitu sebanyak 25 Orang, dan Lainnya Seperti Pada Grafik Dibawah ini :

Grafik 1.5



Sumber Data: Sekretariat BKAD 2022.

C. ISU STRATEGIS

Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagaimana isu yang dituangkan dalam Renstra Perubahan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :



- 1 • Optimalisasi manajemen Aset Daerah
- 2 • Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual*
- 3 • Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, dan SimBMD)
- 4 • Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pengelolaan Kas Daerah yang berhadapan dengan percepatan realisasi APBD dan tertib administrasi
- 5 • Optimalisasi dan modernisasi pelayanan berbasis mutu, melalui Inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



Sejak tahun 2007 sampai 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menggunakan Sistem Aplikasi SIAKUDA yang berbasis online dalam penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan, tahun 2022

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih bergandengan dengan Aplikasi SIAKUDA dimana sistem penganggaran dan penatausahaan kurang sinkronnya penganggaran dan Penatausahaan dalam penyelesaian aset, pengadaan barang dan Jasa, dan daya serap anggaran yang kecil, selain itu juga diperkuat dengan kurangnya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan antara lain dengan permasalahan Infrastruktur yang kurang memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



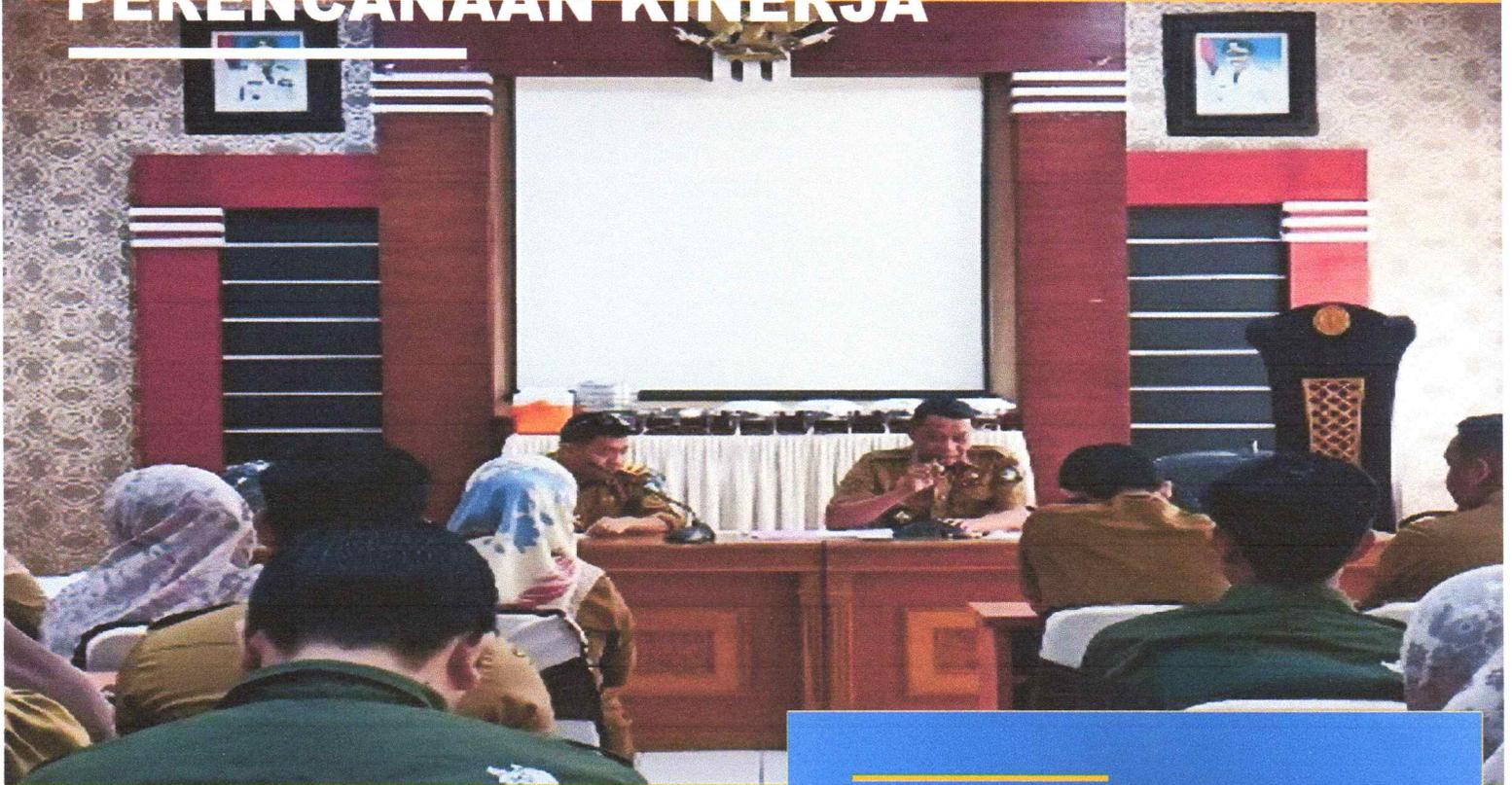
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem *Onspam (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)* yaitu aplikasi yang mengintegrasikan Pelaporan DAK Fisik dan Aplikasi ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik) sebagai alat bantu SKPD untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi terintegrasi tersebut terus dikembangkan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kab. Bone, dan yang kedua yaitu Sim Gaji Taspen, aplikasi yang berbasis digital untuk menampilkan informasi proses pelayanan Bendahara Umum Daerah. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mempermudah mengetahui jalannya proses pelayanan pada Bendahara Umum Daerah dalam Pengelolaan Gaji dan tunjangan PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bone.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja masa datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



- A. TUJUAN DAN SASARAN**
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- D. PERJANJIAN KINERJA**
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar2.1
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel secara berkesinambungan”

Indikator :

- Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD

2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran BKAD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator : Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran 2 : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi

- Indikator : 1. Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat waktu
 2. Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat Waktu
 3. Asset Manajemen

Tabel 2.1

Matrix Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Asset Manajemen	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Rencana Strtegis Perubahan Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengembangan daerah mempunyai arah kebijakan dimana pada tahun 2022 arah kebijakan dengan pelayanan publik yang berbasis tehnologi informasi.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera					
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel secara Berkesinambungan	- Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang bersih, Transparan Efektif, dan Akuntabel dan Berbasis Tehnologi Informasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD-P 2021

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Telah Menetapkan IKU Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 2.2 IKU Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	2	3	4	5
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini
1		Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat
2		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	Tepat Waktu
			Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Asset Manajemen	%

Sumber data: Sumber data PERBUP IKU

Berdasarkan data diatas Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 mempunyai Tujuan yaitu untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel secara Berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan dua Sasaran dimana sararan pertama Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP, sedangkan Sasaran ke dua dengan 3 Indikator yaitu Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu, Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu, Asset Manajemen.

D. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dari uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

Tujuan: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel secara berkesinambungan.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP		
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	BB		
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Asset Manajemen	%	100		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	38.572.551.291
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	455.831.800.217
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.464.402.088
					Jumlah	495.868.753.596

Sumber data : BKAD Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas Bahwa pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang Akuntabel secara berkesinambungan maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai dua sasaran, sasaran **pertama** dengan satu Indikator yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan Program Kegiatan Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Sebesar Rp. 38.572.551.291

sedangkan Sasaran **ke Dua** dengan tiga Indikator yaitu indikator Pertama Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu, Indikator Ke dua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu kedua indikator ini sama-sama dalam Program pengelolaan Keuangan Daerah dengan Anggaran Rp. 455.831.800.217,- Indikator Ketiga Asset Manajemen dengan Program Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 1.464.402.088 jadi total keseluruhan dalam Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. **495.968.753.596,-**

Scan QR Barcode Untuk
Melihat Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2022



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja

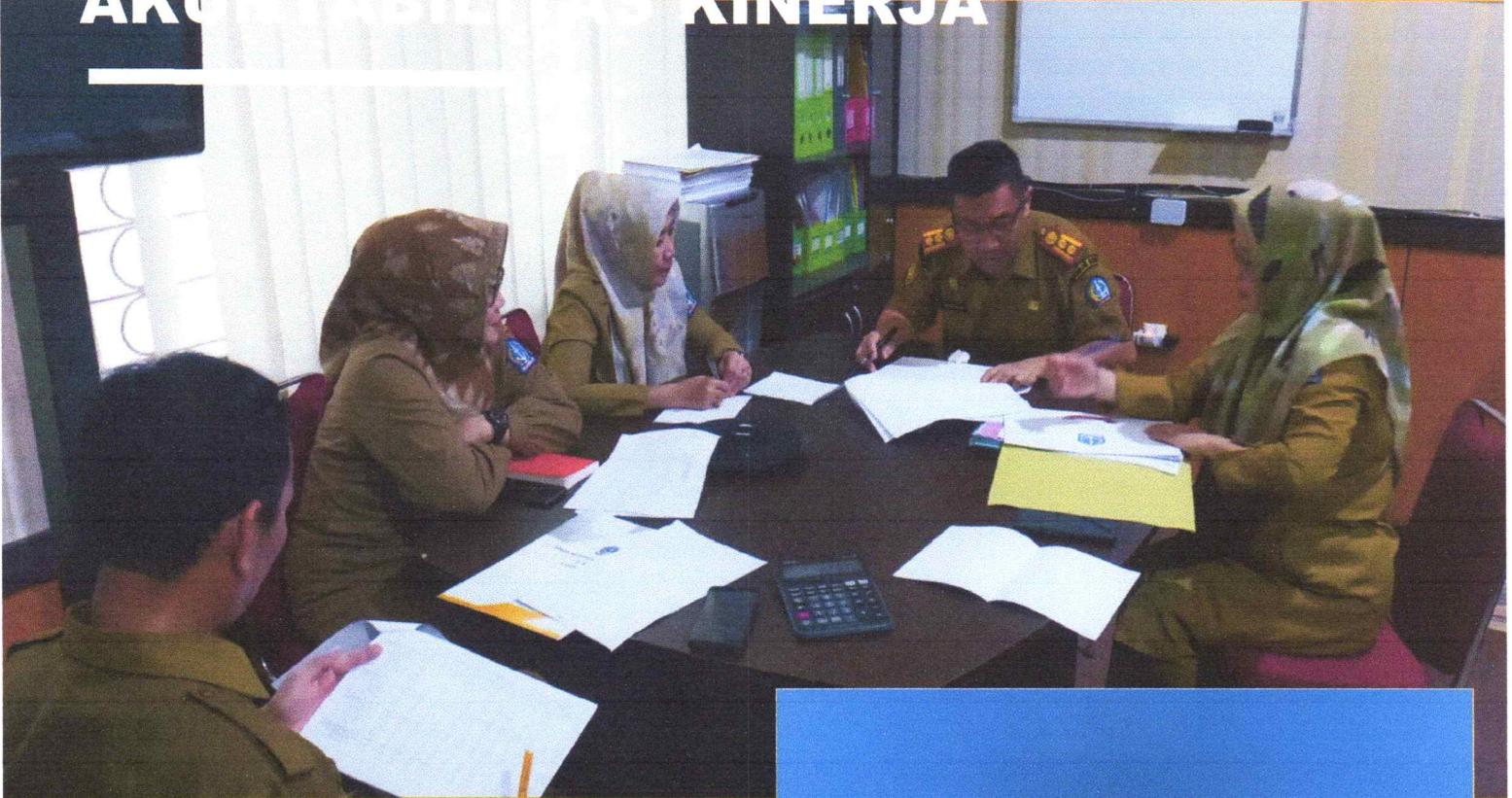
Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
90 < x < 110	Tercapai/Berhasil
60 < x < 90	Cukup tercapai/Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
 - B. REALISASI ANGGARAN**
-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja BKAD pada tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Meliputi :

Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan

Indikator Tujuan : Opini BPK-RI berdasatrkan hasil audit terhadap laporan keuangan pemeraintah daerah (LKPD)

Sasaran : 1 Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dengan Indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat waktu
2. Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu
3. Asset Manajemen.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone maka Analisa yang dilakukan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2022	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	*WTP	*100%
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	*A	*120%
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	100%	100%	100%
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Asset Manajemen	100%	100%	94,73%

Sumber Data : (BKAD Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan Bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana dari Tahun sebelumnya 7 Kali Berturut- turut mendapatkan Nilai Opini WTP namun pada tahun 2022 masih dengan nilai Prediksi *WTP disebabkan karena belum ada hasil Audit dari BPK-RI, begitupun dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Evaluasi

SAKIP oleh APIP dengan Tahun sebelumnya Mendapatkan Nilai A namun pada Tahun 2022 diprediksi dengan Nilai *A karena belum ada hasil Penilaian dari Inspektorat. Sedangkan sasaran Kedua sudah mencapai 100 persen dengan rata – rata hasil Yang diperoleh dari Tujuan / Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah 98,24% atau telah mencapai target.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2020 – 2022. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2020	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				2021	2022	2021	2022
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	*WTP	100	*100%
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	*A	100	*120%
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Asset Manajemen	99,17%	99,85%	94,73%	99%	94,73

Sumber Data : BKAD Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Relisasi Kinerja dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan dalam mencapai Opini pada Tahun 2022 masih diprediksi dengan Nilai realisasi *WTP

ini dikarenakan karena BPK –RI belum menilai, begitupun juga dengan Sasaran **pertama** yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 juga masih dipreksi realisasi kinerjanya dengan Nilai *A karena Inspektorat Daerah belum melakukan penilaian kinerja, namun bila disandingkan dengan Tahun sebelumnya Tujuan dari Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Telah mencapai Opini WTP sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 sedangkan pada sasaran **ke dua** dengan 3 indikator sebagai berikut:

- Indikator pertama, Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat Waktu, dalam penyusunan penetapan APBD ini paling lambat 30 November tahun berkenaan sedangkan perubahan APBD paling lambat 30 September tahun berkenaan, dalam Target Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Tahun 2022 telah mencapai target dengan tepat Waktu, dan bila disandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi kinerja dan capaian kinerja tepat Waktu.
- Indikator Kedua, Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu. Laporan keuangan daerah sesuai ketentuan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD untuk diAudit BPK paling Lambat 3 (tiga) bulan setelah ahir tahun, dalam realisasi kinerja dan target kinerja pada indikator penyusunan Laporan ini telah menyelesaikannya dengan tepat waktu.
- Indikator ketiga Asset Manajemen, Laporan hasil Evaluasi dan Nilai Potensi Aset daerah dengan data daftar asset tetap, menyusun laporan secara manual, proses inventarisasi asset tahunan, Nilai asset tercantum dalam Laporan Anggaran dalam realisasi kinerja pada tahun 2022 telah mencapai target sebesar 94,73 % sedangkan

capaian kinerja sebesar 94,73% bila disandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan dalam pengelolaan asset barang milik daerah.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2018	REALISASI KINERJA	
				2019	2020
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih					
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
		Persentase Aset Tetap yang dapat dimanfaatkan	99	99,17	97,19
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Pengukuran survey kepuasan masyarakat	77	77	80
		Predikat SAKIP BPKAD atas Hasil Evaluasi Inspektorat / Kemenpan RB	B	B	BB

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2020	REALISASI KINERJA			TARGET 2023
				2021	2022	2023	
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan		Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	*WTP	-	WTP
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	*A	-	A
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	100	100	100	-	100
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	100	100	100	-	100
		Asset Manajemen	99,19%	99,85	99.88	-	100

Sumber Data : BKAD Tahun 2022

Berdasarkan data diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam Mencapai tujuan yaitu Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan dengan dua Sasaran dan Lima Indikator maka perbandingan yang dicapai antara Realisasi Kinerja dan target Jangka Menengah Renstra telah mencapai target ,pada sasaran kedua belum ada Penilaian dari Inpektorat daerah namun pada tahun sebelum telah mencapai target dengan nilai A begitupun juga dengan Opini tahun sebelumnya telah mendapatkan nilai WTP dari tahun 2017 sampai tahun 2022.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	RATA - RATA CAPAIAN	PREDIKAT			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan	Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100	WTP		√		
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100	BB		√		
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	100	100		√		
	Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	100	100		√		
	Asset Manajemen	94,73	94,73		√		

Sumber Data : Realisasi Capaian Target tahun 2022

Berdasarkan data diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkesinambungan dengan Indikator Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana dari Tahun sebelumnya 7 Kali Berturut- turut mendapatkan Nilai Opini WTP namun Pada tahun 2022 belum ada hasil Penilaian, begitupun dengan sasaran pertama Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan Tahun sebelumnya Mendapatkan Nilai BB namun pada Tahun 2022 belum ada hasil Penilain dari Inspektorat. Sedangkan sasaran Kedua sudah Mencapai 100% dengan Rata – rata Hasil Yang diperoleh dari Tujuan / Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Adalah Mencapai Predikat dengan Predikat **Berhasil**

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

table besar Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN			EFISIENSI SUMBER DAYA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) $e(d/c \times 100\%)$	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%) $h(g/f \times 100\%)$	% $i(e-h)$	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)	
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dalam Pemerintahan Daerah	Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	-	-	38.572.551.291	38.130.027.151	98,85	-
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu	100	93,41	93,41	3.020.103.620	2.821.027.153	93,41	0
		Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu	100	96,59	96,59	464.243.577.597	448.429.559.390	96,59	0
		Asset Manajemen	100	94,73	94,73	1.464.402.088	1.387.199.097	94,73	0

Sumber Data : BKAD Tahun 202

Berdasarkan Tabel diatas maka dalam rangka mencapai kinerja sasaran **Pertama** dengan Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 38.572.551.291 dan Relisasi Anggaran sebesar Rp.38.130.027.151 dengan capaian rata-rata sebesar 98,85 % telah dilaksanakan secara Efisien, namun dalam Penilaian SAKIP oleh APIP belum ada hasil nilai dari Inspektorat Daerah. Begitupun juga dengan sasaran **ke Dua** dengan 3 Indikator Indikator Pertama Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu , Indikator Kedua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu dan Indikator ke tiga Asset Manajemen , ke tiga Indikator ini didukung dengan dua Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/Perubahan APBD tepat Waktu dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.020.103.620 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.2.821.027.573 dengan rata-rata capaian sebesar 93,41 %, Indikator Kedua Penyusunan dan Penetapan LKPD Tepat Waktu dengan pagu Anggaran sebesar Rp.464.243.577.597 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.448.429.559.390 dengan rata-rata capaian sebesar 96,59 % dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator Asset Manajemen pagu Anggaran sebesar Rp.1.464.402.088 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.387.199.097 dengan rata-rata capaian sebesar 94,73% telah dilaksanakan dengan Efisien.

6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel secara berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja dalam Pemerintahan Daerah				Opini BPK - RI Berdasarkan Hasil Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	*WTP	*WTP	Lebih meningkatkan kualitas LKPD menuju WTP
					Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APPI	Predikat	BB	*A	*A	Meningkatkan Bimbingan Teknis terhadap pencetakan sistem AKIP dan melaksanakan secara terus menerus untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi sistem AKIP
					Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat Waktu	Persen	100	100	100	Melakukan secara terus menerus perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses penyusunan dan penetapan APBD
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi				Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu	Persen	100	100	100	Melakukan Strategi Percepatan Penyusunan LKPD 2022 dengan menggunakan APBD penatausahaan
					Asset Manajemen	Persen	100	100	100	Melakukan Kerjasama dengan Aparat penegak hukum (APH) dan Kejaksaan Negeri Bone untuk melakukan penertiban asset-aset pemda
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknik Perangkat Daerah	%	700	700	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Setiap Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	Dalam perencanaan anggaran akan lebih meningkatkan penerapan dan kaidah kaidah perencanaan anggaran, kelengkapan dokumen pendukung trmian koordinasi yang digunakan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1	100	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	1	1	100	untuk mencapai perencanaan anggaran yang berbasis kinerja
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	1		100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100	Rencana ruang lingkup penyediaan gaji dan tunjangan ASN lebih ditugaskan dalam penyusunan rincian anggarannya agar dalam pembayaran gaji tepat waktu secara terus menerus
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Setiap Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	Menciptakan integrasi antar pegawai supaya bisa bekerja dengan efektif dan kooperatif juga menciptakan loyalitas pegawai terhadap lingkup Badan Keuangan dan Aset daerah kab. Bone
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	12	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan Aparatur Pembina Yang Bersertifikat	Persen	100	100	100	Untuk memperlancar aktivitas dalam mengendalikan dan menyelenggarakan pekerjaan Administrasi Umum maka perlu memfasilitasi dengan membergunakan SDM untuk menunjang tujuan Organisasi secara efisien.
				Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	110	100	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	100	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang	1	1	100	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	12	12	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor Berbasis IT Setiap Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	15	15	100	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12	12	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	20	20	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	58742	58742	100	
				Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Dokumen	52	52	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1100	1100	100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah		Cakupan Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	Persen	100	100	100	Dalam Pelaksanaan pengadaan Barang dalam lingkup BKAD akan lebih memperhatikan pengawasan Internal sejak perencanaan
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	1	100	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	15	15	100	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	28	28	100	hingga serah terima barang lebih diigatkan
				Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Jasa Penyediaan dan Pelayanan Kantor Setiap Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	Akan lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran aktifitas untuk menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparaturnya dapat melaksanakan kerjanya dengan optimal
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3467	3467	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rekening	36	36	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Yang Disediakan	Laporan	120	120	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	100	Perawatan dan Pemeliharaan Barang bukti lebih ditingkatkan agar barang bukti tetap dalam kondisi prima saat proses penyimpanan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Laporan	45	45	100	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	0	0	100	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	40	40	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Paket	3	3	100	Melakukan secara terus menerus perbaikan berkelayuhan dari tahun ke tahun dengan melibatkan penangku kepentingan secara aktif dalam proses penyusunan dan pencapaian APBD
					Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBD Sesuai Ketentuan	Tepat Waktu	100	100	100	
					Persentase Penyaluran Belanja Daerah Terhadap Total APBD	%	50	50	100	
					Persentase Belanja Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Total APBD	%	21,96	21,96	100	
					Persentase Penyaluran LK SKPD sesuai SAP Berbasis Aktual (%)	%	97,49	97,49	100	Melakukan Strategi Percepatan Penyusunan LKPD 2022 dengan menggunakan SIPD penatausahaan
					Persentase SIPA Terhadap Total APBD (%)	%	2,41	2,41	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	100	100	Melakukan secara terus menerus perbaikan berkelayuhan dari tahun ke tahun dengan melibatkan penangku kepentingan secara aktif dalam proses penyusunan dan pencapaian APBD
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Dokumen PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Di Verifikasi	Dokumen	2	2	100	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
				Koordinasi dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	1	1	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD Yang Diverifikasi	Dokumen	1	1	100	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA - SKPD Yang Di Verifikasi	Dokumen	1	1	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	100	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2	2	100	
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	1	1	100	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100	100	100	
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	SP2D	7500	7500	100	Meningkatkan dan lebih mengintegrasikan pelayanan penyelesaian SP2D agar dalam penyelesaian SP2D secara benar dan lengkap sampai didatangi advist List kepala Kantor
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	SPM	7261	7261	100	
				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PRK) dan laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PRK)	Laporan	12	12	100	
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	100	
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung Jawab Sub Kegiatan	Dokumen	2	2	100	
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	12	12	100	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah	Persen	100	100	100	Melakukan Strategi Percepatan Penyusunan LKPD 2022 dengan menggunakan SIPD penatausahaan
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	4	4	100	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Dokumen	4	4	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	4	4	100	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten / Kota	Orang	4	4	100	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Persen	100	100	100	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100	
			Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	2	2	100	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Laporan	2	2	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penyelenggaraan Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar (%)	Persen	100	100	100	Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APRH) dhi Kejaksaan Negeri Bone untuk melakukan pemertihan asset-asset pemda
			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milika Daerah	Persen	100	100	100	
			Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Dokumen	4	4	100	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	100	
			Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	6	6	100	
			Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
				Optimalisasi Penggunaan, Pemantauan, Perindahaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemantauan, Perindahaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	2	2	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah telah mencapai target indikator utama yang telah ditetapkan, dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar Rp. 495.868.753.596,- dan diparsial setelah perubahan mengalami penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak sebesar Rp. 11.431.881.000,- maka jumlah Anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 507.300.634.596,- Realisasi sebesar Rp. 490.767.812.791,05,- atau 96,74%

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 96,74% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota , mempunyai 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian target kinerja 100%
- Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan 4 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100%.
- Program Pengelolaan barang Milik Daerah mempunyai 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

7. Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 dengan melalui analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1) Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan
- 2) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai baik.
- 3) Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang secara konsisten terutama dengan memperhatikan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan,
- 4) Melakukan perbaikan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati terkait biaya pelayanan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah kerja Kabupaten Bone, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan mendatang lebih baik.
- 5) Meningkatkan kedisiplinan, etos kerja dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) khususnya bagi petugas pelayanan/Frontline yang melayani masyarakat secara langsung serta menetapkan

standarisasi internal mengenai sikap layanan, disiplin kerja, jiwa melayani yang tulus dan mendapatkan dukungan keluarga.

- 6) Memberikan pelatihan keterampilan dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas pelayanan.
- 7) Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan, dengan mengoptimalkan media yang sudah ada untuk diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website OPD pelayanan publik, Situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor, Facebook, Twitter , telepon , SMS center, Email, dan lain sebagainya
- 8) Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- 9) Mempedomani dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta membuat dan Menindaklanjuti Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.

Walaupun pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 tercapai, berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibagi berdasarkan fungsi – fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD.

Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar.

Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 7 kali sejak tahun 2016-2021 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan

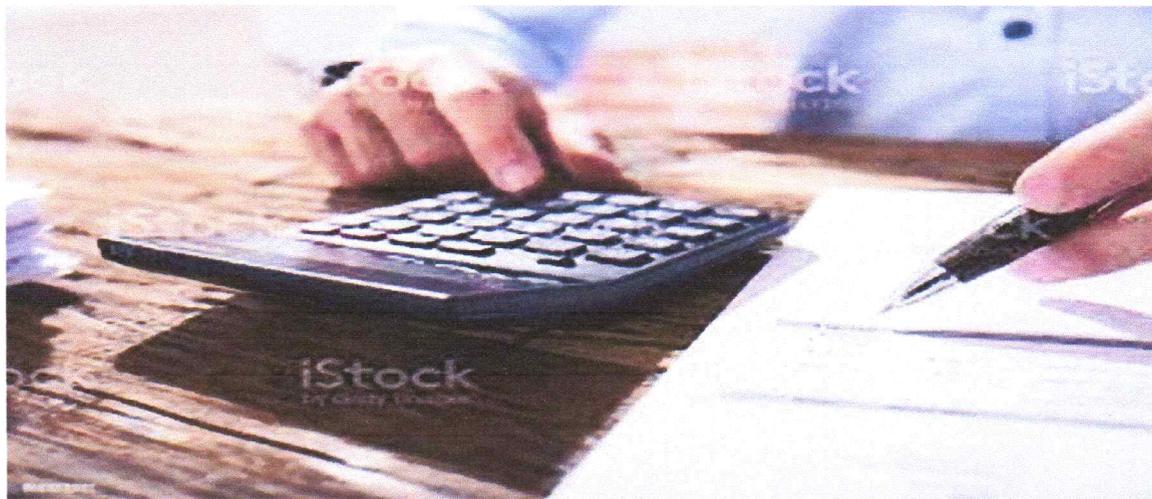
keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan APBD, sehingga public dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

8. Layanan Administrasi Perkantoran

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan Anggaran sebesar Rp.507.300.634.596,-sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp.490.767.812.791.05 sebagaimana tabel sebagai berikut:



Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH		PERSEN
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel Secara Berkesinambungan	507.300.634.596	490.767.812.791.05	96,74
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam Pemerintahan Daerah	38.572.551.291	38.572.551.291	98,85
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	468.728.083.305	452.637.785.640,05	96.56
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	38.572.551.291	38.572.551.291	98,85
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	467.263.681.217	451.250.586.543,05	96,57
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.464.402.088	1.387.199.097	94,73

Sumber Data BKAD Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam realisasi anggaran didukung oleh 2 sasaran dan 4 indikator sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan daerah dengan indikator

- 1.1 Indikator predikat SAKIP oleh APIP dengan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota , mempunyai 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 38.572.551.291 dan Realisasi sebesar Rp. 38.130.027.151 dengan rata-rata capaian target realisasi 98,85% .

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang bersih, Transparan, dan Akuntabel secara berkesinambungan dengan indikator :

- 2.1 Indikator Penyusunan dan Penetapan APBD/ Perubahan APBD tepat waktu .
- 2,2 Indikator Penyusunan dan Penetapan LKPD tepat waktu kedua indikator 2.1 dan 2.2 didukung oleh Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan 4

Kegiatan dan 28 Sub kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 467.263.681.217 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 451.250.586.543,05 rata-rata capaian target realisasi sebesar 96,57%.

- 2.3 Indikator asset Manajemen dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.464.402.088 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp 1.387.199.097 rata-rata capaian target realisasi sebesar 94,73%.

Jumlah keseluruhan Anggaran Tahun 2022 Sebesar Rp. 507.300.634.596 dengan Realisasi Sebesar Rp. 490.767.812.791 dengan capai target realisasi sebesar 96,74% .



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Capaian Kinerja Utama OPD telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, yang meliputi Layanan internal BKAD dan Layanan Lintas SKPD

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone juga menjadi makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA BKAD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 adalah *Berhasil*, karena seluruh indikator memenuhi kriteria *Berhasil* dan dua indikator memenuhi *Berhasil*.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Kendala

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang mendapat dukungan dari segi pendanaan;
- b. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi BPKD Provinsi atas RAPBD Kabupaten;
- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut;
- d. Proporsi pengalokasian belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja aparatur;
- e. Penatausahaan BMD SKPD belum memadai
- f. Kurang tertibnya mekanisme inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
- g. Belum Optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan
- h. Belum tersedianya sumber daya manusia yang handal dan profesional
- i. Pengurus barang pada SKPD kurang memadai karena sering terjadi perbedaan dalam memasukkan dan / atau inputing dalam entry data Simda BMD. Pengurus Barang dan / atau operator yang terlatih sering diganti atau mutasi tanpa memperhatikan penggantinya.

Upaya

Untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah maka upaya yang dilakukan dalam rangka capaian sasaran sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Aparatur badan keuangan dan Aset daerah Kab.Bone agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi itu pengelolaan keuangan daerah yaitu penganggaran dan penatausahaan keuangan melalui SIPD
2. Menyusun Strategi penguatan SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Bone melalui koordinasi , konsultasi dengan pemerintah Provinsi dan / atau pemerintah pusat dalam evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dengan asset daerah dengan narasumber Pejabat dari kementerian RI dan / atau lembaga – lembaga Negara serta narasumber Pemerintah kota/ kabupaten lainnya yang memiliki prestasi / terobosan atas capaian kinerjanya.
3. Penyiapan Regulasi System dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan Standar harga satuan untuk mendukung pelaksanaan SIPD
4. Penguatan kualitas Aparatur badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi pengelolaan asset daerah.
5. Berperan dalam rangka penatausahaan yang handal, cepat informative.
6. Menyusun kebijakan khusus tentang pengelolaan pemanfaatan asset daerah yang meliputi inventarisasi, dokumen penagihan,, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka peningkatan PAD.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 merupakan laporan tahunan. Berdasarkan masalah

dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance serta meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

Watampone, 17 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BONE



H. NAJAMUDDIN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19631007 198611 1 002

LAMPIRAN



MATRIKS RENSTRA



CASCADING KINERJA



**RINGKASAN PENGUKURAN
RENCANA AKSI**



PENGHARGAAN



INOVASI